



Kalla Sarankan Anggaran DKI Diperbaiki

Anggaran Sudah Bisa Digunakan Pada 24 April.

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan mulai bisa digunakan dua pekan setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Keputusan itu mengenai persetujuan penggunaan pagu APBD 2014 untuk mendanai pembangunan pada tahun ini. “Artinya, anggarannya sudah bisa digunakan 24 April mendatang,” kata Ahok—sapaan Basuki—di Balai Kota, kemarin malam.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang didampingi Ahok, telah menyerahkan rancangan peraturan gubernur yang melandasi penggunaan APBD 2014 kemarin. Penyerahan rancangan peraturan gubernur itu dilakukan lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak menyetujui hasil evaluasi APBD 2015.

Ahok mengatakan penggunaan APBD 2014 akan memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya, pemerintah DKI tak bisa menggunakan pendapatan asli daerah yang melebihi target proyeksi. Sebagai contoh, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta akan menerapkan sistem pajak *online* secara menyeluruh mulai April mendatang. Ia memprediksi sistem itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak. “Kelebihannya hanya bisa menjadi semacam tabungan,” kata dia.

Kisruh APBD DKI ini memantik Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memanggil Ahok, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan perwakilan DPRD kemarin. Target pertemuan terpisah antara Ahok dan anggota DPRD DKI itu untuk mencapai kesepakatan menggunakan Peraturan Daerah tentang APBD 2015. “Karena sampai batasnya Perda ditolak, ya harus memakai Peraturan Gubernur,” kata JK—panggilan Jusuf Kalla—di kantornya kemarin malam.

Dia mengingatkan bahwa menggunakan peraturan gubernur akan berbahaya karena pendanaan harus mengikuti anggaran yang lama. Kondisi ini berarti Jakarta tidak mengalami kemajuan. JK berharap Dewan DKI dan Ahok kembali membicarakan ulang anggaran dalam peraturan gubernur. Kalau ada ketidaksesuaian, kata dia, nanti harus dibuat ulang dalam anggaran perubahannya. “Itu solusinya.”

Akibat ketidaksepakatan Dewan ini, Jakarta menggunakan pagu anggaran 2014 senilai Rp 72,9 triliun untuk mendanai program pembangunan tahun ini atau lebih rendah Rp 180 miliar dari rencana anggaran 2015.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan musabab tak disepakati peraturan daerah adalah eksekutif dinilai tak siap dan tak serius. “Kami (Dewan) dianggap ada dan tiada,” kata Prasetyo di kantor Wakil Presiden. “Kini saatnya saya ajak seluruh anggota Dewan mengawal APBD.”

● MUHAMMAD MUHYIDDIN | TIKA PRIMANDARI | LINDA HAIRANI | ERWAN HERMAWAN



TEMPO/IMAM SUKAMTO

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin.

Naik-Turun Anggaran

Jika pemerintah DKI kembali menggunakan anggaran 2014, ada badan yang bakal menerima kucuran dana lebih besar karena, tahun lalu, jatah mereka lebih besar daripada tahun ini. Tapi ada juga yang mengecil.

Nama Lembaga	2014*	2015**
1. Komisi Penanggulangan AIDS DKI	19,2	17,4
2. KONI DKI	300	239,5
3. Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha	1	0,7
4. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta	3	1
5. PMI DKI	21,4	10
6. Badan Pusat Statistik DKI	3,3	0,775
7. Kartu Jakarta Pintar	779	3.000
8. Dewan Riset DKI	3,5	4,5
9. Karang Taruna	1	1,8
10. Badan Kerja Sama Pembangunan	2	4
11. PGRI DKI	0	1,8

Catatan:

*anggaran 2014 dalam miliar rupiah

**rencana anggaran 2015 dalam miliar rupiah

DINI PRAMITA | AISHA SHAIDRA